

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusting, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.
- Abdul Aziz Hakim, *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dengsi Kristina, *Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang sering Terjadi Di DKI Jakarta*, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2012
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2014
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematk Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung:Refika Aditama, 2008

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*,
Bandung : Refika Aditama, 2011.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia- Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2015

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Bagian Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan – Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Medan: Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 2007.

Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atna Jaya, 2009.

Ima Erlic Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*
Malang: Alumni, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Jimly Assihdiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta:

Konstitusi Perss, 2005.

Junaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta: PT.

Prenadamedia Group, 2018.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung

: Citra Aditya Bakti, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan*

Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum,

Universitas Padjajaran, Bina Cipta, Bandung

Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-tugas Jabatan*

Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Medan : Softmedia, 2011.

R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Cetakan ke-I, CV.

Rajawali, Jakarta, 2002.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pascasarjana FH

Universitas Indonesia, 2003

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita

W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Jakarta: Cahaya Atma

Pustaka, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Aturan Peralihan

C. Sumber Lainnya

1. Jurnal

<https://media.neliti.com/media/publications/164969-ID-unsur-perbuatan-melawan-hukum-yang-dilak.pdf>. Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tanggal 30-1 Agustus 2000, Hotel Borobudur, Jakarta./
diakses (2 April 2020)

2. Internet

<https://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>
diakses (1 Desember 2019)

3. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Perkara Nomor :
212/PDT/2018/PT.MKS

